

RINGKASAN

Ahmad Taufik Hidayatulloh, 2020, Evaluasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Angkutan Perkotaan Kota Probolinggo. Imam Sucahyo, S.IP., M.AP, Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si, Renny Candradewi P., M.A,
139 hal+xv

Angkutan umum menjadi budaya terhadap kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dengan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang tinggi, salah satunya di Kota Probolinggo. Angkutan kota masih diprioritaskan sebagai sarana lembaga instansi maupun masyarakat umum.

Namun demikian, pengguna angkutan kota tidak lepas dari biaya yang dikenakan pada besaran tarif angkutan perkotaan. Oleh karena itu, masih terdapat persoalan pada tingkat kemampuan dan kemauan pihak yang dikenakan aturan belum tumbuh signifikan sesuai dengan harapan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis usaha-usaha dalam pencapaian pada penerapan aturan besaran tarif angkutan perkotaan di Kota Probolinggo. Guna mengetahui target-target dan tujuan secara formal serta kendala yang mempengaruhi pencapaian selama ini disaat berlangsung.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kebijakan pada ketetapan tarif angkutan perkotaan dirancang sedemikian banyak patokan harga oleh pemerintah. sebelum ditetapkan, beliau melakukan rundingan melibatkan pemerintah kota, pihak perwakilan sopir dan perwakilan masyarakat serta unsur-unsur lalu lintas lainnya. ketentuan ini untuk menghindari ketidak seimbangan dan ketidak ada pihak yang diberatkan ataupun dirugikan. begitupun petugas Dinas Perhubungan Kota probolinggo telah menerapkan tugas-tugasnya, akan tetapi belum menyelesaikan persoalan, karena terdapat ketidak harmonisasi antara pihak operator dan pemerintah sehingga kebijakan aturan besaran tarif angkutan perkotaan yang diundangkan sejak tahun 2015 belum mencapai target-target formal.

Kata kunci : Angkutan Perkotaan, Peraturan Besaran Tarif, Kota Probolinggo

SUMMARY

Ahmad Taufik Hidayatulloh, 2020, Evaluation of Probolinggo Mayor Regulation No. 5 of 2015 concerning the Amount of Urban Transport Tariffs of Probolinggo. Imam Sucahyo, S.IP., M.AP, Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si, Renny Candradewi P., M.A 139 hal+xv

Public transportation has become a culture of community needs that cannot be separated from high mobility and community activities, one of which is in the City of Probolinggo. City transportation is still prioritized as a means of institutional institutional and the general public.

However, urban transport users are inseparable from the fees charged on urban transport tariffs. Therefore, there are still problems at the level of ability and willingness of those who are subject to rules that have not grown significantly in line with expectations.

The pupose of this study is to describe and analyze the efforts in achieving the application of the rules of urban transport tariffs in the City of Probolinggo. In order to know the targets and objectives formally as well as the obstacles that have affected achievement so far while it is ongoing.

The results of this study can be concluded that the policy on the provision of urban transport tariffs is designed so many price benchmarks by the government. Before it wes established, he conducted negotioation involving the city government, the driver's representative and community representatives as well as other trasffic elements. This provision is to avoid imbalance and the absence of a party who is burdened or harmed. Likewise probolinggo City Transportation Department officials have implemented their duties, but have not yet resolved the problem, because there is an not harmonizing between the operator and government so that the policy od the regulation of urban transport tariffs enacted since 2015 has not reached formal targets.

Keywords : Urban Transport, Tariff Amount Regulations, Probolinggo City